

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buchari Said. (2017). *Hukum Pidana Materil*. FH UNPAS.
- Kusumaatmadja, M. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Unpar.
- Simanjuntak, N. (2005). *Kriminologi*.
- Yusep Mulyana. (n.d.). *Viktimologi 4.0*. MDP Media.
- Pangaribuan, L. M. P. (2003). *Hukum Acara Pidana Satu Komplikasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan hukum internasional yang relevan*.

Jurnal

- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- P BN Sqwartz. (2014). KAJIAN HUKUM TENTANG DELIK PENIPUAN. *Jurnal Hukum*.
- Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>
- Unair, J. (n.d.). *pembentukan jaringan sosial calo di Terminal Purabaya*. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts17a332a3e7full.pdf>
- Wibawa, H. K. (2019). Optimalisasi Upaya Perlindungan Alumni Pencari Kerja Dengan Integrated Vacancy System Carcentos. *Jurnal Hukum*, 17–18. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/ICCN/article/view/2722>

Kusumawati, P. J. (2019). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.*

Qomaruddin, W. (2010). *PERANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI (Nomor 2005). UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.*

TIRTO, M. (n.d.). (*Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) *PENDAHULUAN Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah , jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendaki. 1–7.*

Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (“Perkap 23/2010”)

Sumber Lainnya : Internet

- Cahyono*, E. A. (2020). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kepolisian Resor Gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 11.
<https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18007>
- Calista. (2022). Perbedaan Laporan dan Pengaduan. In *LBH PENGAYOMAN. UNIVERSITAS KATOLIK PARAHİYANGAN*.
- FIANDY, N. I. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan* (Vol.10). UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Ilmi, A. (2018). *KAJIAN HUKUM TENTANG DELIK PENIPUAN. UNIVERSITAS MEDAN AREA*.
- Mahkamah Agung. (2018). *putusan No. 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi)*.
- Makmur, E. (2021). *Sanksi Pelaku Wanprestasi*.
- RAHMAN, R. (2022). *TANGGUNGJAWAB PELAKU PENIPUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA*. Universitas Islam Kalimantan.
- Santoso, L. (2017). *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa. et-Laksana Yogyakarta*.
- YPA Sitepu. (2019). *Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia* 1. 9–25.